



KEMENTRIAN BARU NOMENKLATUR BARU

LAPORAN UTAMA

Harapan Baru, Nomenklatur Baru dan Indonesia Maju

LIPUTAN KHUSUS

UKM PIB : Tameng dari Kemenristekdikti
Penangkal Radikalisme Kampus

LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271





Pada tanggal 23 Oktober 2019 yang lalu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akhirnya mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengenal lebih dekat siapa saja Menteri yang menjabat di Kabinet baru ini. Maka dari itu, Replik edisi kali ini mengangkat tema “Kementerian Baru, Nomenklatur Baru”. Dengan adanya nomenklatur baru, akankah Kabinet Jokowi Jilid 2 ini menjadi lebih efektif? Temukan jawabanmu pada rubrik Laporan Utama.

Pada rubrik Liputan Khusus, kita juga akan mengetahui bagaimana tindak lanjut dari Permenristekdikti no.55 Tahun 2018 tentang Pengawasan Ideologi Bangsa tingkat mahasiswa di lingkup kampus. Selain itu, Replik edisi kali ini juga akan membahas mengenai Revisi dari UU KPK serta peran mahasiswa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan masih banyak rubrik-rubrik lain yang sangat menarik untuk dibaca.

Tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.05 ini dan banyak terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Vol.05 ini. Akhir kata, selamat menikmati teruntuk kalian para pembaca. Semoga Replik Vol.05 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan jiwa kritis serta kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita tercinta. Salam semangat juang pers mahasiswa!

Adita Lembana
Redaktur Pelaksana Replik

COVER

Layouter : Hilmi Yustisia, Aldiva



STRUKTUR ORGANISASI

PEMIMPIN UMUM Daris Jaka
 SEKERTARIS UMUM Widi Dwi
 BENDAHARA UMUM Krisna Julianti
 DEWAN REDAKSI Haedar Ibnu, Khairunnisa, Elizabet, Ray Habib, Ricki, Satya Adi, Meilia Peranginangin
 PEMIMPIN REDAKSI Zidney Ilma
 SEKERTARIS REDAKSI Putri Andika
 REDAKTUR ARTISTIK Gayatri Dyah
 STAFF Hilmi, Audrey
 REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV Kornel
 STAFF Dwi Retno
 REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Aji, Kahargian
 REDAKTUR PELAKSANA JURNAL Hayyu Qomaryah, Annisa nuralam
 REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Adita Lembana
 REDAKTUR PELAKSANA BUKU Adinda Intan
 REDAKTUR PELAKSANA TABLOID Fanisya
 REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE Reza Aditya, Stefani Yulindriani
 PEMIMPIN PERUSAHAAN Carlos Bonardo
 MANAGER RUMAH TANGGA Apri Adi
 MANAGER IKLAN DAN PROMOSI Sindi Rayhananda
 MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI mardiansyah
 STAFF PERUSAHAAN Aliyah. Naomy, Indah, Anin, Fahmi, Maufah
 PEMIMPIN LITBANG Faldy Tiesta
 KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA Nurul Aini
 KASUBDIV RISET & KAJIAN Mario Julyano
 STAFF LITBANG Yuda, Sarah, Rico, Tika, Nico, Luthfi, Bob
 PEMIMPIN PSDM Rafia Alfiantoro
 STAFF PSDM Dinas, Ayu, Yulia, Devita, Aji, Bagus, Ayudya, Crystania, Zulfiyar, Rizka, Rizky, Nining, Dinda
 PEMIMPIN HUMAS Genio Krisna
 KASUBDIV INTERNAL Rudy Afriansyah
 KASUBDIV EXTERNAL M. Wildan
 STAFF HUMAS Zhafira, Icha, Inri, Yusron, Gloria, Dimas C, Hima

DAFTAR ISI

- 1** Liputan Utama
Harapan Baru, Nomenklatur Baru dan Indonesia Maju
- 6** Liputan Khusus
UKM PIB, Tameng dari Kemenristekdikti Penangkal Radikalisme Kampus
- 9** Hukum
Teken Perpers Jokowi Naikkan Tarif BPJS
- 13** Budaya Korupsi, Bisakah Hilang dari Indonesia ?
- 15** Pro Kontra
KPK Dulu dan Kini
- 18** Opini
Bedah Kinerja Masa Pemerintahan Jokowi-JK
- 21** Bincang
Kumpas Tuntas Revisi UU KPK dan Peran Mahasiswa dalam Memberantas Korupsi
- 24** Pojok Kota
Saloka Theme Park : Wisata Po[uler dan Taman Bermain Terbesar di Jawa Tengah
- 26** Suara Mahasiswa
- 29** fakta Menarik dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Harapan Baru, Nomenklatur Baru, dan Indonesia Maju



Kontestasi politik pemilihan presiden 17 April 2019 yang lalu telah lama usai, Komisi Pemilih Umum (KPU) sudah menjalankan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan baik, keributan yang terjadi selama pemilihan berlangsung telah teratasi semenjak pengumuman resmi presiden terpilih, polemik-polemik yang

terjadi setelah adanya pemilihan sudah ditangkis habis oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Publik pun memiliki beragam reaksi. Publik yang menempatkan sebagai oposisi agak kecewa dengan hasil tersebut, meski sekarang publik yang demikian sudah *legowo* atau sudah terima dengan lapang dada. Sebaliknya, pendukung yang bukan oposisi

merayakan kemenangan dengan suka cita atas kemenangan jagoan mereka, yaitu Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin.

Bulan demi bulan berganti, tepat di tanggal 23 Oktober lalu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akhirnya mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet

Indonesia Maju, berbeda dengan periode sebelumnya yang menggunakan nama Kabinet Indonesia Kerja. Hal ini menurut Presiden Joko Widodo yang akrab dipanggil "Jokowi" mengungkapkan dalam lima tahun kemarin berpedoman pada kerja, kerja, dan kerja maka ketika kata kerja sudah di dalam hati harapan selanjutnya ialah maju. Perlu digaris bawahi kata maju juga terdapat di dalam visi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang berbunyi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong".

Hari-hari sebelum pengumuman kabinet sudah santer terdengar desas-desus adanya perubahan nomenklatur dalam susunan kabinet Jokowi jilid II. Ada dua versi yang santer terdengar, pertama ialah versi Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden. Menurut dia, akan ada perubahan 10 nomenklatur lembaga sedangkan menurut Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengatakan akan ada

perubahan nomenklatur kementerian sebanyak 3 kementerian dan 1 badan.

Berbicara mengenai perubahan nomenklatur kabinet sebenarnya hal ini tidak asing di telinga publik, sebab di periode sebelumnya Presiden Jokowi saat berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah merubah nomenklatur susunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun disinyalir berbeda dengan periode yang pertama, periode kedua Jokowi lebih banyak terjadi perubahan nomenklatur susunan kabinet.

Benar saja pada saat pengumuman kabinet yang pengumumannya agak unik, yaitu presiden, wakil presiden beserta menteri-menternya duduk di tangga Istana Negara. Disitu diumumkan terdapat 34 kementerian dan 4 pejabat setingkat dengan menteri yang akan dilantik secukupnya. Dari 34 kementerian ada 3 kementerian dengan nomenklatur baru, yaitu ada di Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dahulu hanya bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Dengan adanya nomenklatur baru, maka kementerian tersebut juga akan bertugas mengoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan investasi. Kementerian ini dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri dipimpin oleh Wishnutama Kusubandio. Kementerian ini merupakan leburan dari Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif yang ada pada periode sebelumnya. Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan

Riset dan Inovasi Nasional dijalankan oleh Bambang Brodjonegoro. Menariknya Kementerian ini tidak lagi mengurus Perguruan Tinggi seperti Kementerian sebelumnya.

Kembali lagi ke pembahasan pokok, dari sejumlah menteri-menteri yang diumumkan terdapat beberapa wajah lama yang mengisi kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan ada juga wajah-wajah baru yang menghiasi jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Nama-nama tersebut antara lain yang *pertama*, Tito Karnavian, sebelum menjadi Menteri Dalam Negeri RI beliau menjabat sebagai Kepala Polri, Kepala Densus 88 Anti Teror, Mabes Polri, Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saat masih menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beliau memimpin tim khusus kepolisian untuk membongkar jaringan teroris. Namun dari serangkain prestasi yang diterima ada juga beberapa

isu hangat yang mencatutkannya, seperti diduga menerima aliran dana gratifikasi miliaran rupiah dari perusahaan importir daging. Bahkan sepekan sebelum pelantikan tersebar video rekaman CCTV perusakan buku merah. Itu semua tidak menyurutkan niat Jokowi untuk tetap melantiknya sebagai Menteri Dalam Negeri RI. Bahkan beliau diminta mengawasi penggunaan APBD dan memastikan kepastian hukum bagi investor di daerah.

Kedua, Mahfud MD. Sebelumnya Mahfud MD sempat menjadi calon Wakil Presiden untuk mendampingi Jokowi, namun batal di "*injury time*". Beliau ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Mahfud MD mencetak sejarah baru sebagai orang sipil pertama yang menduduki jabatan tersebut yang sebelumnya selalu diduduki oleh kalangan militer. Sebelum menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang

Keamanan RI, beliau pernah menjadi Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPPI), Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013, Anggota Komisi 3 DPR 2004-2008, Menteri Pertahanan RI, Menteri Kehakiman 2000-2001. Beliau diminta presiden fokus mengoordinasikan penegakan hukum. Selain itu Mahfud MD juga berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan catatan bukan untuk kelompok tertentu melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ketiga, Ida Fauziah. perempuan kelahiran Mojokerto, 16 juli 1969 diamanahkan menjadi Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024. Sebelumnya beliau pernah menjadi Anggota DPR RI selama 20 tahun dan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Guru SMA Kalijati Surabaya. Ida Fauziah juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama Sudirman

kasus korupsi penyele-nggaraan ibadah haji. Beliau diminta fokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan inovasi padat karya dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Selanjutnya Wishnutama, karirnya dimulai saat bekerja di industri pertelevisian pada waktu kuliah di Amerika. Kemudian pulang ke Indonesia dan bekerja sebagai *Supervisor On Air Promotion* di Indosiar dan pindah ke Trans7 dan berkat tangan dinginnya sejumlah acara Trans7 menduduki peringkat tertinggi. Karirnya menanjak hingga menduduki jabatan sebagai direktur utama TransTV. Kemudian mendirikan NetTV pada 2016. Kesuksesannya sebagai konten kreator tidak diragukan lagi terbukti dengan suksesnya *opening ceremony* dan *closing ceremony* Asian Games 2018 yang sangat spektakuler sehingga menjadi perbincangan dunia. Wishnutama diamanahkan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta

Ekonomi Kreatif 2019-2024. Pesan dari Presiden Jokowi kepada *Wishnutama* ialah mengembangkan industri kreatif dan membuka destinasi wisata baru.

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan ditunjuknya Nadiem sebagai Menteri, beliau memilih mundur sebagai *CEO* Gojek. Banyak orang mempertanyakan mengapa beliau diberi posisi Mendikbud yang sangat jauh berbeda dengan profesi yang dijalankannya saat ini. Namun Nadiem optimis bisa mengangkat derajat pendidikan di Indonesia. Khusus untuk Nadiem Makarim, beliau menerima 4 perintah dari Presiden Jokowi, antara lain Indonesia bukan hanya Jakarta, standardisasi kualitas pendidikan, kurikulum sesuai zamannya, dan buat sistem aplikasi pendidikan.

Kemudian Prabowo Subianto. Gagal keempat kalinya menjadi Presiden RI, beliau ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi untuk

Ketua Umum Partai Gerindra menyetujui atas nama kepentingan bangsa. Mantan Damjen Kopasus ini berjanji akan memperkuat alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dimiliki [TNI](#). Beliau juga menegaskan, penguatan Alutsista ini merupakan langkah untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin setelah mengumumkan beberapa nama yang mengisi 34 jabatan kementerian langsung memberikan pesan kepada 34 orang menteri yang terpilih. Pesan *pertama* yang dikatakan ialah menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Hal tersebut tentunya menjadi peringatan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia dikarenakan saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di peringkat 4 se-ASEAN dan berada di peringkat 89 seluruh dunia dengan berada di zona 3 yang dilansir

m e n u r u t
*Transparency International
Indonesia.*

Pesan yang *kedua* ialah tidak ada visi-misi menteri yang ada hanya visi-misi presiden dan wakil presiden. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena mengkhawatirkan terjadinya berbeda paham antara presiden dengan pembantu presiden sekaligus mencegah adanya menteri yang memimpin seolah menjadi presiden.

Pesan yang *ketiga* disampaikan ialah semua harus kerja cepat, kerja keras, dan bekerja secara produktif. Sekaligus *keempat*, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Kedua pesan itu saling berhubungan dengan maksud kerja harus dengan cepat dan keras, namun bekerja setiap hari seperti demikian akan membuat rutinitas yang monoton dan menjenuhkan sehingga dapat mengurangi produktivitas setiap komponen. Maka harapan dari presiden dan wapres ialah tetap produktif.

Pesan *kelima* ialah kerja yang berorientasi pada hasil yang nyata. Kemudian Pesan *keenam* ialah selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Kedua pesan ini menitikberatkan pada kerja nyata, kerja yang berorientasikan bukan hanya data komputer tetapi data yang dapat ditemui langsung di lapangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua pesan ini secara tidak langsung menyuruh setiap pembantu presiden untuk blusukan.

Pesan yang terakhir ialah pesan yang ketujuh, semuanya harus serius dalam bekerja. Ketika ada yang tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja maka bisa saja dicopot ditengah jalan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pesan ini memberikan sebuah peringatan tegas kepada seluruh menteri agar tidak jemawa terhadap jabatan yang sudah diamanahkan.

Sederet menteri-menteri yang dipilih dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memang memiliki beragam

latar belakang, namun lebih banyak dari kalangan politisi daripada kalangan profesional tapi tidak apa-apa, kelebihan dari banyaknya kalangan politisi ialah untuk menyeimbangkan kondisi perpolitikan tanah air dan perlu digarisbawahi, asalkan mereka tidak korupsi dan bekerja sesuai dengan amanat presiden dan wakil presiden. Selain membahas kalangan politik, harapan kebanyakan publik terkait masalah radikalisme yang kian mencuat, kebakaran hutan, revisi UU, sistem zonasi pendidikan, konflik di Papua, revolusi mental, dan pelanggaran HAM. Dari sekian permasalahan yang hadir semua berharap dalam 5 tahun kedepan Indonesia b e n a r - b e n a r b i s a mengatasinya dan menjadi negara maju sesuai dengan Kabinet Indonesia Maju.

**Taufik Hidayat & Tania
Sukma Melati**

UKM PIB, Tameng dari Kemenristekdikti Penangkal Radikalisme Kampus



Tepat pada tanggal 28 oktober 2018 saat memperingati Hari Sumpah Pemuda, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 mengenai Pengawasan Ideologi Bangsa tingkat mahasiswa di lingkup kampus. Pengawasan tersebut akan direalisasikan dalam

bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas atau yang nanti dapat dikenal sebagai UKM PIB. Pembentukan UKM PIB ini tentunya tidak luput dari itikad baik dari Pemerintah guna mencegah dan menanggulangi paham radikalisme dan isu intoleran yang berkembang di kampus. Selain itu adanya UKM PIB ini juga bertujuan untuk mewadahi pikiran kritis serta pergerakan mahasiswa dalam menginventarisasi

isu-isu kampus, khususnya yang berbau radikalisme.

Pembentukan UKM PIB ini selain bertujuan untuk menangkal radikalisme, itu juga sebagai suatu alat pemantik dari pihak Kemenristekdikti yang kemudian diturunkan ke Universitas. Adanya UKM PIB ini, juga memiliki peran sentral untuk memperkuat hubungan antara pihak petinggi kampus dengan mahasiswanya yang juga disematkan harapan agar terjalin suatu hubungan yang sinergis.

Setelah adanya pembentukan Permenristekdikti tersebut, tercatat telah ada dua Universitas di Indonesia yang menerapkan UKM PIB sebagai pilar dalam

pergerakan kampus. Dua nama kampus tersebut yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB) dan yang kedua yaitu salah satu Universitas yang ada di Jawa Timur.

Mengingat dirasa belum matang, lahirnya Permenristekdikti ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak universitas. Penolakan oleh beberapa universitas terkait adanya UKM PIB ini dikarenakan sudah ada di dalam kurikulumnya mengenai pelajaran Ideologi Pancasila. Maka atas dasar tersebut, kemudian dirasa sangat sia-sia apabila terdapat suatu unit yang mengawal adanya Ideologi Pancasila. Selain itu, banyak juga yang pro atas lahirnya UKM PIB ini dikarenakan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 ini dirasa sangat penting untuk penanaman ideologi bangsa yang peran terbesarnya adalah oleh pergerakan mahasiswa. Menelisik lebih dalam lagi terkait manfaat adanya UKM PIB ini, selain menangkal

radikalisme sebenarnya juga memiliki peluang besar untuk mencegah politik praktis di kalangan mahasiswa. Politik praktis tersebut tentu dapat dibenarkan adanya, mengingat organisasi ekstra kampus menjadi momok paling ditakuti terkait adanya politik praktis tersebut. Tentu sebuah kekhawatiran jika organisasi ekstra kampus disetir oleh kelompok tertentu. Penangkal terdepan adalah, adanya turun tangan langsung dari pihak kampus ke organisasi mahasiswa tersebut.

Adanya Permenristekdikti yang melahirkan sebuah UKM PIB tersebut memiliki sokongan penting atau suatu bentuk pembinaan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. UKM PIB dibina oleh pimpinan perguruan tinggi dan diisi oleh organisasi mahasiswa intra kampus maupun organisasi ekstra kampus. Hal ini menarik

dikarenakan Organisasi Ekstra kampus yang tadinya dilarang untuk masuk ke dalam kampus, di Permenristekdikti ini justru perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi mahasiswa Ekstra kampus seperti HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI.

Penelusuran lebih lanjut terkait pantas tidaknya UKM PIB ini berdiri menuai respon positif oleh salah satu pihak ekstra kampus yang ada di Universitas Diponegoro. Salah satu organisasi ekstra, lebih tepatnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat FH menyampaikan bahwa adanya UKM PIB akan didukung selagi garis besar tujuannya adalah untuk menangkal radikalisme serta mewadahi pergerakan mahasiswa. Tentu saja pergerakan mahasiswa yang sesuai dengan Pancasila.

Iran Raksa Hidayat, selaku Ketua HMI komisariat FH mengungkapkan pernyataan dukungannya terhadap

Permenristekdikti tersebut. Alasan ungkapan dukungan tersebut secara garis besar disampaikan oleh Ian bahwa seluruh organisasi mahasiswa sejatinya harus berlandaskan dengan Pancasila agar nantinya dapat bergerak sesuai koridor bangsa dan tidak terjerumus ke lubang radikalisme.

" Adanya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya UKM PIB saya setuju, mengingat semakin dewasa ini paham radikalisme ditakutkan semakin meluas khususnya di kalangan mahasiswa" Ujar Ian. Meskipun menyatakan setuju, namun Ian tetap menjaga bahwa seharusnya pihak kampus tidak mencampuri urusan ekstra mahasiswa terlalu jauh. Karena memang pada dasarnya ekstra merupakan suatu organisasi luar kampus yang memang eksis dan bergerak demi kesejahteraan mahasiswa tanpa atas nama kampus. Suatu organisasi yang berdiam di

kampus namun memiliki lingkup yang luas bahkan pada tingkat nasional. Akan terlihat lucu apabila kampus ikut mengatur segala kegiatan di dalam ekstra.

" Adanya Permenristekdikti ini akan membuka kran bahwa organisasi ekstra dapat berkecimpung di dalam lingkup kampus. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaannya" Pungkas Ian.

Lalu, pelaksanaan yang dimaksudkan di sini bahwa organisasi ekstra cenderung tidak akan setuju apabila seluruh organisasi ekstra masuk ke dalam kendali UKM PIB. Akan lebih dapat diterima oleh mahasiswa khususnya anggota ekstra apabila pelaksanaannya berupa pemberian delegasi dari setiap ekstra ke UKM PIB sebagai bentuk koordinasi antara organisasi ekstra terkait dengan UKM PIB itu sendiri. Selain itu, mungkin terjadi penolakan apabila garis hubungan antara pihak

Rektornya dengan organisasi ekstra adalah berupa garis komando bukan garis koordinasi.

Reza Aditya dan Ariq Helmi



TEKEN PERPRES, JOKOWI NAIKKAN TARIF BPJS

Kamis, 24 Oktober 2019, Sah! Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kenaikan itu melibatkan dan berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan peserta bukan pekerja. Iuran BPJS berlaku untuk seluruh segmen peserta. Dari mulai iuran mandiri kelas III dari Rp.25.000 perbulan menjadi Rp.42.000. Kelas II dari

Rp. 51.000 menjadi Rp.110.000 dan untuk kelas I dari Rp.80.000 menjadi Rp.160.000, berlaku mulai bulan Januari 2020. Dengan kenaikan yang hampir mencapai seratus persen, tarif iuran BPJS ini menuai polemik di masyarakat.

Kenaikan tarif BPJS banyak menimbulkan pro dan kontra. Rabu, 2 Oktober 2019 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

melakukan aksi unjuk rasa. Peserta aksi serikat pekerja tersebut dilangsungkan di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto dan di depan Istana Negara dengan jumlah peserta sebanyak 50.000 orang, aksi tersebut dilakukan juga di wilayah Jabodetabek.

Tak hanya itu, dalam kasus ini, DPR juga angkat bicara untuk menanggapi, bahkan DPR Menolak keras

adanya kenaikan BPJS. Aktuaris Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Angger Yuwono mengatakan, kemungkinan DPR dan sejumlah elemen masyarakat menolak kenaikan tersebut karena belum memahami latar belakang perhitungannya. Sangat disayangkan, karena yang ditolak DPR adalah segmen peserta yang menggunakan dana JKN paling besar, tetapi iurannya tidak sesuai, kenaikan iuran kelas III peserta mandiri sudah diperhitungkan secara matang. Saat menetapkannya, DJSN menggunakan data-data pengalaman JKN-KIS selama lima tahun terakhir. Mulai dari biaya kesehatan per orang per bulan, kenaikan jumlah peserta hingga kenaikan upah. Dengan data itu, DJSN membuat simulasi iuran yang bervariasi untuk delapan kelas peserta, yaitu PBI, tiga kelas peserta mandiri (kelas I, kelas II, kelas III), dua kelas Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah (kelas I dan kelas

II), serta dua kelas PPU Swasta. Menurut Angger, biaya kesehatan yang dinikmati peserta mandiri kelas III ini hampir lima kali lebih besar dari iuran yang dibayarkannya selama ini. Biaya kesehatan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 124.000, tetapi iuran yang dibayar hanya Rp 25.500. Diperkirakan rata-rata biaya kesehatan peserta kelas III ini akan naik sebesar Rp 125.000 per orang per bulan di akhir tahun 2019, dan kenaikan yang sama pada tahun 2020. Pada asuransi komersial secara teori besaran iuran harusnya sama dengan perkiraan biaya kesehatan untuk tahun yang akan dilalui, sehingga idealnya besaran iuran sebesar Rp 124.000. Tetapi, karena JKN-KIS adalah asuransi sosial yang mengusung prinsip gotong royong, maka selisih dari peserta kelas III ini disubsidi dari segmen peserta lainnya. Saat menggodok simulasi kenaikan iuran tersebut,

DJSN menargetkan BPJS Kesehatan tidak lagi defisit sampai akhir 2021, bahkan menghasilkan surplus ke depannya. Kenaikan iuran ini akan menjaga ekosistem pelayanan JKN-KIS berjalan lancar, karena tidak ada lagi tunggakan pembayaran klaim ke rumah sakit dan perusahaan obat. Hingga akhir 2019 diperkirakan BPJS Kesehatan defisit hingga Rp 32,84 triliun. Hingga Agustus saja tunggakan yang jatuh tempo ke rumah sakit diperkirakan sudah mencapai Rp 11 triliun.

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan telah dilakukan beberapa perubahan yang melatarbelakangi adanya peningkatan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan dan perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Dalam peraturan tersebut, ada beberapa perubahan seperti iuran bagi peserta PBBPU dan

Peserta BP yaitu sebesar Rp.42.000 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, Rp.110.000 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III atau Rp.160.000 dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I, dan untuk besaran iuran berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Setidaknya dalam Peraturan Presiden No.75 Tahun 2019 ini ada 7 pasal yang mengalami perubahan, yang sebagian besar membahas besarnya iuran yang harus dibayar dengan berdasarkan golongan kelasnya. Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ada beberapa dampak yang berarti di masyarakat karena adanya kenaikan BPJS ini. Menurut data dari DJSN ada beberapa dampak dari kenaikan iuran program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Ketua DJSN Tubagus Achmad menyampaikan bahwa penyesuaian tentang Jaminan Kesehatan merupakan upaya untuk

menangani defisit BPJS kesehatan. Meskipun begitu penyesuaian iuran tersebut akan memberikan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, baik bagi BPJS Kesehatan terkait keberlangsungan program JKN, maupun bagi masyarakat selaku peserta. Dampak yang berpotensi muncul adalah peningkatan jumlah peserta non-aktif, khususnya di segmen mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Berdasarkan data BPJS kesehatan, saat ini terdapat sekitar 46% peserta yang tidak aktif. Setelah potensi peserta non aktif meningkat, dampak lainnya yang timbul ialah peserta akan pindah ke kelas yang lebih rendah seiring dengan kemampuannya dalam membayariuran.

Tak hanya itu, dampak lain yang dapat muncul adalah calon peserta enggan mendaftarkan diri ke BPJS lagi. Hal tersebut harus diantisipasi walaupun sudah ada regulasi seluruh masyarakat Indonesia wajib

menjadi peserta BPJS kesehatan. Selain itu, dampak lain dari penyesuaian iuran adalah kualitas pelayanan kepada peserta akan meningkat. Hal ini akan berjalan dengan sendirinya, seiring dengan perkembangan arus kas BPJS yang membaik.

Keberadaan kenaikan BPJS ini diharapkan membuat kas BPJS membaik, sehingga dapat mengembalikan defisit keuangan BPJS dan tidak menimbulkan utang ke rumah sakit sekitar. Dengan defisit yang hampir menyentuh angka Rp. 43 Triliun, setidaknya bisa menutupi kekurangan itu. Ada kemungkinan yang menyebabkan angka defisit dalam kas BPJS, yaitu karena banyaknya PBPU maupun BP yang tidak membayar iuran tersebut, dan meninggalkan kewajiban membayar iuran per bulan tersebut.

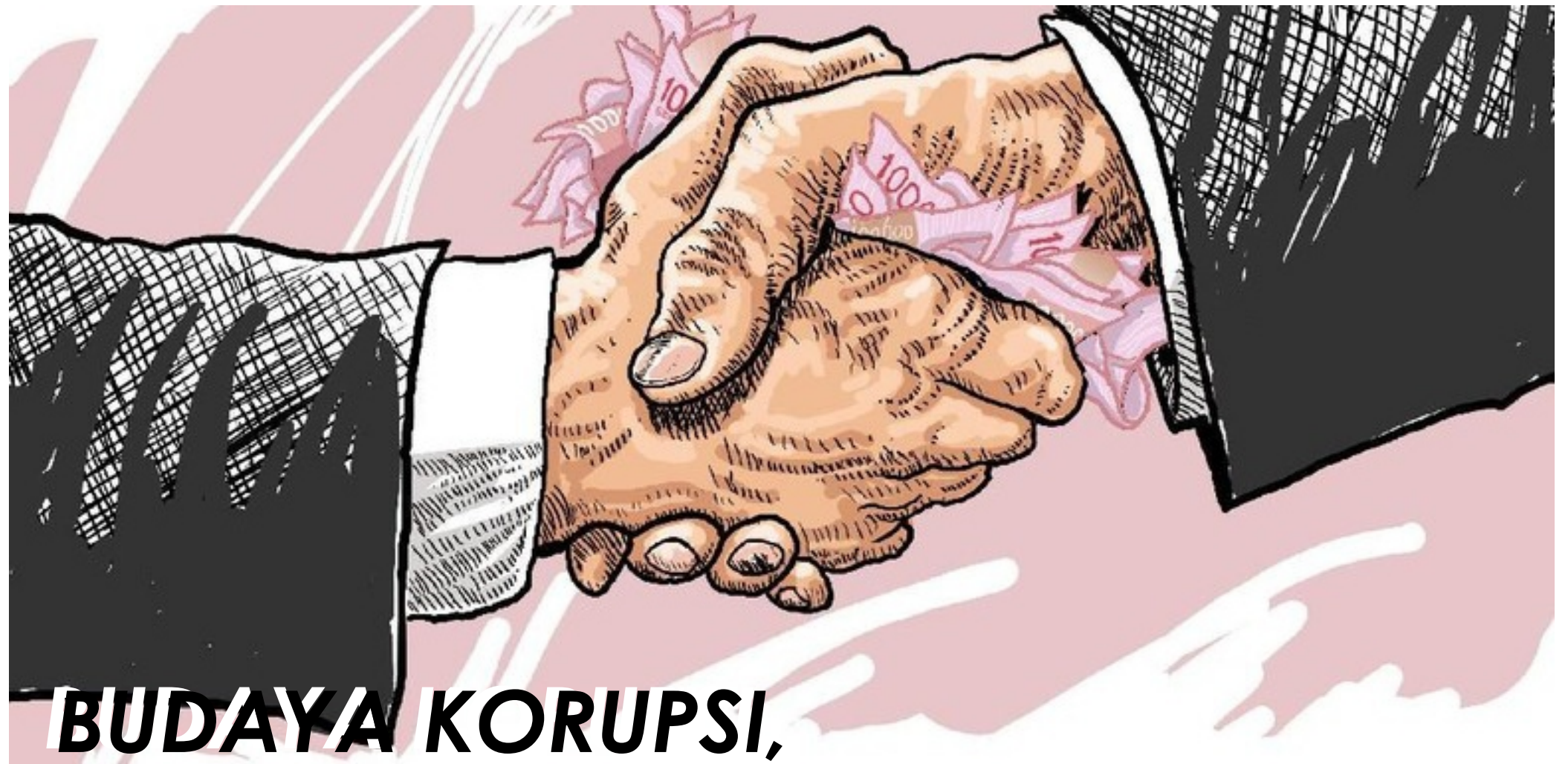
Semua tahu bahwa urgensi adanya BPJS merupakan program pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya dan membantu segala aktivitas

kesehatan, dari pelayanan maupun obat. Pemerintah semua tahu bahwa urgensi adanya BPJS merupakan program pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya dan membantu segala aktivitas kesehatan, dari pelayanan maupun obat. Pemerintah sudah mengusahakan yang terbaik untuk rakyatnya, seharusnya sebagai masyarakat nasionalis,

pemerintah berharap sekali untuk membayar iuran BPJS sesuai dengan tanggal yang telah jatuh tempo, tidak meninggalkan kewajiban untuk membayarnya. Kita semua tahu, BPJS lebih memiliki urgensi untuk warga yang miskin. Tidak ada salahnya sebagai masyarakat yang 'mampu' untuk memberi subsidi dan membantu saudara kita. Semoga dengan adanya peraturan presiden

yang berubah, defisit kas BPJS dapat normal kembali dan dapat berjalan dengan semestinya.

Novia Miftahir R



BUDAYA KORUPSI, BISAKAH HILANG DARI INDONESIA ?

UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong [pemberantasan korupsi di Indonesia](#). Namun hingga kini [pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang](#). Saat ini Indonesia berada di peringkat 107 paling bersih dari korupsi. Di peringkat ini Indonesia mendapatkan nilai 34 dengan predikat negara sangat korup. Berkaca dari hal ini sebenarnya bangsa Indonesia harus malu. Kenapa negara yang hebat ini justru terus digerogeti manusia-manusia korup yang hidup untuk memenuhi kantongnya sendiri. Mari bersama-sama kita selamatkan bangsa kita. *Say No to Corruption!*

KPK dulu dan Kini



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini mendapat sorotan publik karena peraturan perundang-undangan yang mendasari lembaga ini berdiri direvisi. Pada draft RUU KPK yang merupakan revisi dari UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK beberapa pasalnya sempat mendapat sorotan dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk KPK sendiri. 17 September 2019, DPR RI dalam sidang paripurnanya mengesahkan RUU KPK hasil revisi terhadap UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Pengesahan ini pun semakin menaikkan emosi publik. Perevisian terhadap UU No. 30

Tahun 2002 tentang KPK sendiri sebenarnya tidak masuk Program Legislasi Nasional di tahun ini. Tindakan ini dirasa oleh sebagian besar masyarakat dan akademisi sebagai tindakan 'terburu-buru' DPR. Karena dalam waktu singkat, sekitar tiga belas hari dari usulan mengenai perevisian terhadap undang-undang ini hingga akhirnya DPR mengesahkannya dalam rapat paripurna 17 September lalu semua prosesnya seperti melenggang dengan mudahnya. Pimpinan KPK sendiri sempat mengeluhkan proses yang terkesan 'terburu-buru' dan ditutup-tutupi karena bahkan dari pihak KPKnya sendiri tidak

diajak untuk berdialog membahas mengenai perevisian peraturan perundang-undangan ini. Pemberitaan mengenai revisi UU KPK yang disahkan DPR tersebut berjumpa dengan cepatnya arus informasi saat ini membuatnya semakin mudah untuk ditangkap berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Mahasiswa yang terdidik untuk berpikiran kritis pun semakin menjadi kala dirasa ada kejanggalan baik dalam segi proses perevisian maupun dari segi muatan yang terkandung dalam beberapa pasalnya. Aksi massa dengan turun ke jalan pada 24 September 2019 mengagendakan salah satunya

yaitu penolakan terhadap Revisi UU No. 30 Tahun 2000. '#SaveKPK', 'Jangan Lemahkan KPK'. Teriakan-teriakan serta ocehan seperti itu pada laman media sosial selayaknya perlu diperhatikan dan disadari bahwa publik mensinyalir keadaan sedang dan akan tidak baik-baik saja dalam KPK. Satu bulan berlalu sejak Revisi UU KPK disahkan DPR. Pre-iden Jokowi masih belum menandatangani Revisi UU KPK tersebut, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 73 angka (2), yang menyatakan bahwa bila setelah 30 hari sejak disahkan DPR, Presiden masih belum menandatangani, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Cara inilah yang dipilih Presiden Jokowi sebagai tindakan mencari aman. KPK yang dibentuk tahun 2002 pada era Presiden Megawati berlatar belakang karena dirasa tidak dapat diselesaikannya kasus korupsi oleh kepolisian

maupun kejaksanaan. Inisiatif ini muncul dengan harapan nantinya lembaga ini dapat menjadi jalan terang bagi pemberantasan korupsi di negeri ini. DPR pada masa itu dengan tegas mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum berdirinya organisasi ini. Beberapa pasal sempat membatalkan KPK hingga akhirnya hanya empat perihal yang disetujui Presiden Jokowi dan akhirnya disahkan menjadi peraturan perundang-undangan yaitu: KPK dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dikatakan merupakan lembaga negara yang dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun bila dikatakan bebas dari pengaruh manapun apakah akan terwujud? Bahkan yang membedakan pasal dalam undang-undang hasil revisi yaitu di bagian yang mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun

kekuasaan eksekutif. KPK yang dibentuk sejak awal dengan tujuan agar dapat mencegah dan sesuai namanya memberantas korupsi maka yang dicita-citakan adalah independensi yang seutuhnya, bebas dari pengaruh manapun, apalagi pengaruh eksekutif. Tapi sayangnya undang-undang ini tidak menyatakan demikian. Dewan Pengawas yang dengan berbagai perannya yang kini menjadi titik sentral bagi berbagai tindakan KPK. Seperti namanya, peran dari dewan pengawas sendiri yaitu untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang KPK (Pasal 37 A UU No. 19 Tahun 2019). Disatu sisi memang suatu lembaga perlu diawasi demi menjaga wewenangnya dan tanggungjawabnya dijalankan sebagaimana seharusnya. Namun disisi lain, bila kita lihat darimana Dewan Pengawas yaitu berasal dari orang-orang yang dipilih Presiden, maka akan muncul pertanyaan besar mengenai apakah mereka akan benar-benar lolos dari kepentingan-kepentingan tertentu?

Apakah independensi itu benar ada?

Peran sentral Dewan Pengawas ini pun menjadi perlu menjadi sorotan yaitu dalam memberikan izin mengenai penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan KPK. Tindakan-tindakan ini selama ini menjadi senjata KPK untuk mengungkap kasus korupsi. Namun, semua itu harus dilakukan bilamana diberikan izin oleh Dewan Pengawas sendiri.

KPK kini diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi bila proses penyidikan dan penuntutan sudah melewati jangka waktu dan paling lama dua tahun. Keputusan penghentian penyidikan dan penuntutan itu nantinya harus diberitahukan ke Dewan Pengawas KPK paling lama tiga hari setelah penerbitannya.

Penyadapan pun kini yang harus meminta izin Dewan Pengawas dengan mekanismenya itu Pimpinan KPK mengajukan surat tertulis kepada Dewan Pengawas, lalu nanti dalam

maksimal 1x24 jam akan diberikan izin oleh Dewan Pengawas (Pasal 12 B UU No. 19 Tahun 2019). Proses ini pun dibatasi hanya paling lama enam bulan sejak izin tertulis dari Dewan Pengawas diterima KPK, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Prosedur ini dirasa akan menjadi menghambat langkah gerak KPK, dengan banyaknya kasus korupsi dan berbagai pihak yang dapat disidik sehingga ditemukannya bukti-bukti permulaan maka sudah sehar-usnya prosedur yang dibuat semudah mungkin dan tidak membatasi ruang gerak KPK.

Status pegawai KPK yang kini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengangkatannya pun dilakukan seperti pengangkatan ASN lainnya. Selama ini sebagai lembaga yang independen, KPK begitu leluasanya memilih orang-orang yang akan membantu dalam memberantas korupsi ini. Namun kini, dengan dijadikannya sebagai ASN maka semuanya sesuai dengan aturan kepegawaian negara ini baik dari peneri-

maannya, maupun pengaturan lainnya.

KPK yang kini diberikan wewenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan bila penyidikan dan penuntutan ini sudah tidak sesuai dan dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Pemberian wewenang ini sekaligus jangka waktunya dimaksudkan agar diwujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kini tiga komisioner KPK, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang sedang mencoba memperjuangkan keberlangsungan KPK seperti dulu adanya dengan mengajukan judicial review UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan judicial review ini pun bagi Presiden Jokowi membuatnya tidak menerbitkan Perppu, padahal kedua tidak memiliki hubungan keterkaitan.

Bila independensi KPK diintervensi akan jadi apakah KPK pada akhirnya nanti?

-
Stefani Yulindriani

OPINI



Bedah Kinerja Masa Pemerintahan Jokowi-JK

Empat tahun berlalu sudah masa pemerintahan Jokowi-JK. Masa kepemimpinan mereka mempunyai jargon kebanggaannya yaitu “Kerja, kerja, dan kerja!”. Presiden Joko Widodo pun dengan ciri khasnya yang terkenal dengan nama “Blusukan” dan menuai banyak komentar positif dari para netizen yang menanggapi aksi Jokowi

tersebut. Mengingat pada saat masa satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, tentu menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh publik. Saat itu terjadi perbedaan pendapat dalam memandang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang memberikan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan ada pula yang memujinya.

Bahkan ada yang

berpendapat bahwa selama setahun pemerintahannya, Jokowi-JK belum maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Bila mengingat tentang belum maksimalnya pemerintahan Jokowi ini disebabkan karena Jokowi dianggap masih berada dibawah bayang-bayang Ketua Umum DPP PDIP

Empat tahun berlalu sudah masa pemerintahan Jokowi-JK. Masa kepemimpinan mereka mempunyai jargon kebangganya yaitu “Kerja, kerja, dan kerja!”. Presiden Joko Widodo pun dengan ciri khasnya yang terkenal dengan nama “Blusukan” dan menuai banyak komentar positif dari para netizen yang menanggapi aksi Jokowi tersebut. Mengingat pada saat masa satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, tentu menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh publik. Saat itu terjadi perbedaan pendapat dalam memandang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang memberikan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan ada pula yang memujinya.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa selama setahun pemerintahannya, Jokowi-JK belum maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Bila mengingat tentang belum maksimalnya pemerintahan Jokowi ini disebabkan karena Jokowi

dianggap masih berada dibawah bayang-bayang Ketua Umum DPP PDIP Megawati, jadi Jokowi belum leluasa dalam mengambil kebijakan.

Mengenai keberhasilan pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini, perlu kita apresiasi terhadap berbagai keberhasilan yang telah tercipta guna kepentingan seluruh masyarakat. Disini dapat kita lihat keberhasilan Jokowi-JK ini dalam hal kondisi ekonomi di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwa kondisi ekonomi kita ini tergolong memiliki pencapaian yang cukup baik. Diantaranya yang dapat kita ketahui yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dapat terjaga kestabilannya yang berada di angka 5%, ditengah kondisi ketidakpastian global ini. Meski memang Indonesia ini masih berada di angka 5%, namun kondisi ini lebih baik ketimbang dari negara-negara yang lain.

Prestasi selanjutnya adalah inflasi yang terjaga. Indonesia selama lima tahun berhasil menjaga inflasi

dalam sasaran 3,5% secara berturut-turut. Capaian ini memang cukup membanggakan, mengingat kondisi ekonomi global yang penuh gejolak, disamping juga Indonesia pernah memiliki sejarah inflasi hingga dobel digit di zaman pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu inflasi tersebut tetap terjaga pada kisaran 3,2% hingga 3,3% di setiap tahunnya. Bahkan perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini sendiri pun belum pernah menikmati stabilitas pada saat seperti itu, yang terjadi 5 tahun berturut-turut.

Keberhasilan selanjutnya yaitu terkait tingkat kemiskinan yang mengalami perbaikan. Menurut data Pusat Badan Statistik yang mencatat bahwa sejak tahun 2015-2019 pemerintah telah menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2015 angka kemiskinan di Indonesia berada di angka 11,22% yang setara dengan 28,59 juta penduduk miskin di Indonesia.

Di bidang politik, pemerintah disebutkan telah

peserta Kartu Indonesia Sehat.

Setelah berbincang mengenai keberhasilan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, maka perlu kita sadari pada masa pemerintahan Jokowi-JK juga tak luput dari kegagalan. Ditengah euforia pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin pada tanggal 20 Oktober yang lalu, muncul sejumlah catatan kegagalan kinerja pemerintahan di periode pertama. Salah satunya adalah penanganan hukum dan HAM yang dinilai suram.

Menurut Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan penanganan hukum di periode pertama Jokowi sangat amburadul. Menurutnya, hukum di era Jokowi dipakai menjadi alat kriminalisasi warga yang justru mempertahankan hak konstitusionalnya. Ia mencontohkan aksi mahasiswa pada 23-24 September lalu. “Aparat kepolisian justru membui

mereka, menangkap mereka bahkan melakukan kekerasan secara brutal, tidak hanya banyak yang luka-luka bahkan ada yang meninggal,” Ujarnya. Terkait isu pelanggaran HAM berat masa lalu, di era Jokowi, Kejaksaan menjadi lembaga yang melanggengkan impunitas. Ia menyebutkan bahwa hasil penyelidikan HAM berat yang diserahkan oleh Komnas HAM dikembalikan tanpa alasan. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa Jokowi sudah ingkar.

Kemudian dalam hal kenaikan harga BBM dan kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan harga membuat rakyat menjerit. Banyak rakyat yang mengatakan bahwa harga kebutuhan mahal karena dulu dimanjakan subsidi dan impor. Sementara kita tahu bahwa impor akan memberikan efek pengurangan pada neraca perdagangan dan banyak mafia yang bermain. Presiden Jokowi harus bisa meyakinkan rakyat banyak bahwa semua proses

pembangunan khususnya infrastruktur yang sedang dilakukan baru bisa dinikmati jangka panjang.

Sebenarnya tidak semua kebijakan pada masa kabinet Jokowi-JK ini dapat kita rasakan sekarang manfaatnya. Mungkin kebijakan yang sedang diterapkan ini akan dapat kita rasakan nantinya. Memang tidak dapat kita pungkiri, tugas dan tantangan yang dirasakan dari kabinet-JK ini yang begitu besar. Kemudian PR untuk kabinet selanjutnya yaitu perlu dipertegas lagi mengenai masalah perekonomian, penegakan hukum, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

Tanti Fatma

Kapas Tuntas Revisi UU KPK dan Peran Mahasiswa dalam Memberantas Korupsi



Narasumber : Hizam - Ketua Rekam Sidang KPK FH Undip

Kasus korupsi di Indonesia saat ini sedang dalam masa 'kejayaannya'. Banyak sekali Lembaga-lembaga pemerintahan yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) karena perbuatan korupsi ini. Di tengah keberjalanan Lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya ini, banyak sekali hal-hal yang menghalanginya. Salah satunya saat ini ialah adanya revisi UU KPK. Pada RUU tersebut terdapat poin-poin yang dirasa kurang sesuai atau bahkan menjadi faktor pelemahan terhadap

kinerja Lembaga KPK itu tersendiri. Pada revisi UU KPK ini pula Independensi Lembaga KPK tergoyahkan.

Bagaimana Pandangan Anda Terhadap Revisi dari UU KPK?

Tentu Kontra dengan adanya revisi dari UU KPK ini. Mengingat banyak poin-poin terkait dengan independensi KPK. Tim Rekam Sidang Undip sendiri kemarin telah membuat pernyataan

sikap terkait revisi UU KPK tersebut yang telah ditandatangani oleh Civitas akademika, khususnya para profesor-profesor hukum pidana. Dalam revisi UU KPK ini, kami menyoroti adanya dewan pengawas. Dimana apabila akan melakukan penyadapan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dewan pengawas tersebut. Dari sinilah independensi KPK dilemahkan. Padahal pada beberapa kasus Tipikor saat ini bukti penyadapan menjadi penting. Dengan adanya dewan pengawas maka harus ijin.

Apa Pendapat Anda Terkait Masa Depan Indonesia Apabila Revisi UU KPK Disahkan?

Yang jelas ada banyak intervensi dari banyak pihak, salah satunya dalam hal 'keikutsertaan', sebelumnya itu kejaksaan dan kepolisian itu disebut tenaga pembantuan. Jaksa dari kejaksaan RI, Polri diambil untuk penyidik, dan jaksa diambil untuk Jaksa KPK. Kalo sekarang itu mereka masuk ke dalam susunan dari kejaksaan dan kepolisian ini. Dan sekarang di revisi RUU KPK kan ada tuh intinya harus ada kolaborasi antara KPK dan Kejaksaan Agung, nah itu yang salah satu jadi polemik juga.

Bagaimana Pandangan Anda Terhadap Korupsi di Kalangan Mahasiswa?

Dalam konteks yang paling kecil, dalam dunia mahasiswa kita itu 'titip absen'. Itu ya mau gimana lagi sering terjadi, tapi sekarang sudah ada absen online jadi udah tidak bisa dianulir lagi. Terus dalam kegiatan keorganisasian, dalam

menjalankan proker biasanya relevan dengan 'nota kosong', sebenarnya itu sesuatu hal yang simpel nominalnya masih 10 ribu misal nanti 10 atau 20 tahun kemudian jadi anggota dewan yang APBN dan anggaran lainnya yang dana resapannya tinggi terus yang awalnya ketika kuliah "korupsi" 10 ribu jadi 10 juta, 100 juta.

Contoh tidak datang rapat, padahal itu ada sesuatu hal pembahasan yang penting. Ya itu sebenarnya bibit-bibit korupsi. Di DPR juga fenomena 'titip absen' kerap kali terjadi. Kalo kita liat di TV atau youtube ada juga anggota DPR dan dewan lain banyak yang tidur, banyak kursi yang kosong padahal itu pembahasan yang penting. Ketika pembahasan penting mereka main sah-sah aja. Cuma modal ngomong aja tapi sebenarnya tidak bisa kerja dengan benar. Bentuk "korupsi" sebenarnya seperti itu, atau memang ada diantara kita orang yang kritis, Ternyata ketika kita "meminta" orang tersebut untuk berkontribusi hasilnya "0", nah itu juga termasuk korupsi. Sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga merupakan bibit korupsi.

Menurut Anda, Bagaimana Peran dan Upaya Mahasiswa dalam Memberantas Korupsi?

Sebagai peran akademisi dan sebagai seorang mahasiswa salah satunya yang udah kita lakukan beberapa saat yang lalu, kecuali demo, ya itu sebenarnya sudah bukan merupakan suatu aksi yang positif kalo menurut saya, kita pun tidak akan melakukan hal tersebut kalo tidak ada sesuatu hal yang melibatkan hal itu. Kalo untuk

sikap terkait revisi UU KPK tersebut yang telah ditandatangani oleh Civitas akademika, khususnya para profesor-profesor hukum pidana. Dalam revisi UU KPK ini, kami menyoroti adanya dewan pengawas. Dimana apabila akan melakukan penyadapan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dewan pengawas tersebut. Dari sinilah independensi KPK dilemahkan. Padahal pada beberapa kasus Tipikor saat ini bukti penyadapan menjadi penting. Dengan adanya dewan pengawas maka harus ijin.

Apa Pendapat Anda Terkait Masa Depan Indonesia Apabila Revisi UU KPK Disahkan?

Yang jelas ada banyak intervensi dari banyak pihak, salah satunya dalam hal 'keikutsertaan', sebelumnya itu kejaksaan dan kepolisian itu disebut tenaga pembantuan. Jaksa dari kejaksaan RI, Polri diambil untuk penyidik, dan jaksa diambil untuk Jaksa KPK. Kalo sekarang itu mereka masuk ke dalam susunan dari kejaksaan dan kepolisian ini. Dan sekarang di revisi RUU KPK kan ada tuh intinya harus ada kolaborasi antara KPK dan Kejaksaan Agung, nah itu yang salah satu jadi polemik juga.

Bagaimana Pandangan Anda Terhadap Korupsi di Kalangan Mahasiswa?

Dalam konteks yang paling kecil, dalam dunia mahasiswa kita itu 'titip absen'. Itu ya mau gimana lagi sering terjadi, tapi sekarang sudah ada absen online jadi udah tidak bisa dianulir lagi. Terus dalam kegiatan keorganisasian, dalam

menjalankan proker biasanya relevan dengan 'nota kosong', sebenarnya itu sesuatu hal yang simpel nominalnya masih 10 ribu missal nanti 10 atau 20 tahun kemudian jadi anggota dewan yang APBN dan anggaran lainnya yang dana resapannya tinggi terus yang awalnya ketika kuliah "korupsi" 10 ribu jadi 10 juta, 100 juta.

Contoh tidak datang rapat, padahal itu ada sesuatu hal pembahasan yang penting. Ya itu sebenarnya bibit-bibit korupsi. Di DPR juga fenomena 'titip absen' kerap kali terjadi. Kalo kita liat di TV atau youtube ada juga anggota DPR dan dewan lain banyak yang tidur, banyak kursi yang kosong padahal itu pembahasan yang penting. Ketika pembahasan penting mereka main sah-sah aja. Cuma modal ngomong aja tapi sebenarnya tidak bisa kerja dengan benar. Bentuk "korupsi" sebenarnya seperti itu, atau memang ada diantara kita orang yang kritis, Ternyata ketika kita "meminta" orang tersebut untuk berkontribusi hasilnya "0", nah itu juga termasuk korupsi. S e s u a t u h a l y a n g t i d a k b i s a dipertanggungjawabkan juga merupakan bibit korupsi.

Menurut Anda, Bagaimana Peran dan Upaya Mahasiswa dalam Memberantas Korupsi?

Sebagai peran akademisi dan sebagai seorang mahasiswa salah satunya yang udah kita lakukan beberapa saat yang lalu, kecuali demo, ya itu sebenarnya sudah bukan merupakan suatu aksi yang positif kalo menurut saya, kita pun tidak akan melakukan hal tersebut kalo tidak ada sesuatu hal yang melibatkan hal itu. Kalo untuk

Saloka Theme Park :

Wisata Populer dan Taman Bermain Terbesar di Jawa Tengah



Semarang memiliki banyak tempat wisata yang ciamik dan menarik. Ada banyak pilihan wisata di sekitar Semarang. Mulai dari wisata alam, religi, hingga wisata sejarah dan budaya. Tetapi ada yang baru dan menarik di Semarang. Saat ini, Semarang menyuguhkan tempat rekreasi baru yang patut untuk dicoba. Tempat wisata tersebut bernama Saloka Theme Park. Menjadi salah satu destinasi wisata populer dan digadang-gadang taman bermain terbesar di Jawa Tengah, Saloka Theme Park menghadirkan ber-bagai wahana seru mulai dari yang ekstrim hingga ramah untuk anak-anak. Dibuka pada bulan Desember tahun 2018 yang lalu, taman rekreasi ini diklaim sebagai yang terbesar di Jawa Tengah. Saloka Theme Park juga dibangun di lahan yang strategis, yaitu jalur lintas provinsi Semarang-Salatiga. Jaraknya hanya 40 km dari Salatiga dan 60 km dari Solo. Dari Bandara Ahmad Yani, dapat dilalui dengan memakan waktu selama 45 menit. Nama Saloka Theme Park diambil dari tempat berdirinya tempat rekreasi ini, yaitu Danau Rawa Pening. Luasnya mencapai 18 hektar dan memiliki sekitar 25 wahana rekreasi untuk segala kalangan usia. Tempat rekreasi ini dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 sampai pukul 18.00. Sedangkan di hari libur seperti Sabtu dan Minggu, taman

rekreasi ini dibuka hingga pukul 20.00 WIB.

Saloka Theme Park memiliki 5 zona tematik, yaitu Zona Pesisir, Zona Balantar, Zona Segara Prada, Zona Kamayayi dan Zona Ararya. Masing-masing wahana mengusung tema yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan zona yang ada. Kita dapat menikmati suasana pantai di Zona Pesisir. Aktivitas bermain yang ditawarkan di zona ini antara lain Cakrawala, Lumbang Ilmu Galileo, Taman Galileo, hingga Area Jejogedan dan Kapal Jenju. Zona Balalantar mengambil suasana hutan be-lantara. Ada wahana permainan bertema alam, diantaranya Agro-wisata Ijo Royo-royo sebagai area edukasi untuk pengenalan berbagai jenis tanaman buah dan bunga. Ada pula Angon Ingon atau kebun binatang, kemudian Kumbang Layang, Jamur Apung, Safari Bocah, Adu Tangkas, dan Adu Nyali. Sedangkan Zona Segara Prada menawarkan wahana per-mainan yang

membuat tubuh menjadi basah. Wahana permainan tersebut adalah Gonjang Ganjing atau arungjeram.

Zona Kamayayi adalah zona yang sangat cocok untuk anak-anak dan balita. Hal ini didukung dengan wahana yang memang didesain untuk anak kecil, seperti Polah Bocah, Kupu-Kupu, Pinguin, Tata Titi, Komidi Kuda Laut, dan masih banyak lagi. Zona yang terakhir adalah Zona Ararya. Zona Ararya ini dianggap cocok untuk pengunjung yang menyukai tantangan pemacu adrenaline, diantaranya Paku Bumi, Bengak Bengok, Lika Liku, Obat Abit,

dan Senggal Senggol. Ada area untuk bersantai di tempat yang dinamai Kolam Bebek. Pengunjung juga bisa mengisi waktu istirahat di Rimba Cafe untuk makan dan minum.

Salah satu keunggulan dari Saloka Theme Park adalah fasili-tasnya. Terdapat toilet dan tempat sampah hampir di setiap tempat atau zona. Selain itu, Saloka Theme Park juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti tempat ibadah atau mushola, loket, ATM Center, area merokok, dan lain sebagainya. Bahkan Saloka Theme Park memiliki shuttle bus yang dapat mengantar wisatawan ke area

parkir dan kedai makanan yang lengkap. Terdapat beberapa *food truck* dengan aneka menu makanan, serta terdapat pula kafe atau resto di dalamnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Saloka Theme Park juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu, harga tiket masuknya yang terbilang cukup mahal. Kita dapat membeli tiket masuknya dengan harga Rp 120.000,- per orangnya. Tetapi ketika hari libur atau akhir pekan, harga tiket masuk Saloka Theme Park dijual dengan harga yang lebih mahal, yaitu Rp 150.000,- per orangnya.

Adita Lembana



Ahmad Muzaki (2018)

Mengenai susunan kabinet baru yang dibentuk kemarin, yang namanya produk buatan manusia itu tidak ada yang sempurna pasti ada kekurangannya. Tetapi, dari cara pemilihan susunan kabinetnya, itu sudah mencerminkan suara rakyat. Nama-nama yang dikehendaki rakyat akhirnya muncul menjadi Menteri di kabinet itu, termasuk bahwa presiden dalam hal pemilihan kabinetnya melibatkan rakyat untuk ikut memilih dalam susunan kabinetnya, dan selama ini mungkin rata-rata kabinet itu didominasi oleh kalangan politikus, namun berbeda dengan susunan kabinet yang dibentuk sekarang bahwa mengenai susunan kabinetnya itu presiden tidak hanya mengangkat dari kalangan politikus saja, banyak juga dari kalangan TNI, Polisi, maupun dari kalangan Profesional. Jadi, kalau dilihat dalam hal ini, benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kalau pemilihan Menteri sekarang seperti itu. Harapannya tentu dengan pemilihan menteri-menteri kemarin di bidangnya benar-benar sesuai dengan apa yang dijanjikan presiden sebelumnya, bahwa presiden sudah memiliki visi dan misi sebelumnya, seperti di bidang pertahanan. Presiden sudah berjanji akan memperkuat di bidang pertahanan dan

Menurut saya susunan kabinet baru Jokowi ini lebih ke arah milenial, karena orang-orang di dalamnya seperti baru masuk ke dunia politik. Contohnya seperti, Wishnutama dan CEO Gojek (Nadiem Makarim) mereka itu seperti baru masuk ke dunia politik, namun pemikiran mereka itu berevolusi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi, pandangan susunan kabinet baru Jokowi, menurut saya sangat luar biasa dan keren, karena Pak Jokowi itu memasukan orang-orang Milenial zaman sekarang untuk menjadi Menteri guna mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Namun, menurut saya susunan kabinet baru Jokowi itu ada kelemahannya, yaitu tidak dimasukkannya Ibu Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan lagi di pemerintahan ini, padahal beliau memiliki kinerja yang



Fanisa Mayda Ayiliani (2019)



**Waristo Nanda Hulu
(2016)**

Kabinet Indonesia Maju tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya, dimana yang menjadi tujuan utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Namun ada hal yang menjadi pembeda dengan periode sebelumnya yakni adanya campur tangan generasi milenial dalam susunan Kabinet Indonesia Maju saat ini. Hal ini bisa menjadi dampak baik maupun dampak buruk, dimana saat ini terfokus pada pembangunan terhadap infrastruktur, baik itu dari segi pembangunan maupun sumber daya manusianya perlu adanya hal-hal yang diperhatikan yakni perlu adanya gagasan dalam membuat suatu karya, dengan adanya gagasan tersebut perlu dimasukkan dalam sebuah narasi yang nantinya akan terwujud dalam sebuah karya sehingga apa yang menjadi keinginan selama ini dapat tercapai dan menjadi pemahaman bersama bahwa pembangunan infrastruktur periode sebelumnya itu dianggap masih belum sempurna. Sehingga pada periode

Kabinet yang sekarang dapat dilihat melalui 2 sisi yakni sisi kualitatif dan sisi kuantitatif. Secara kuantitatif, Pak Jokowi sudah memenuhi janjinya yakni dengan memperbanyak jumlah profesional pada kabinet sekarang daripada partai. Sedangkan pada sisi kualitatif kabinet sekarang justru melemahkan demokrasi *check and balance* dalam hal bergabungnya Gerindra dalam pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa Gerindra merupakan oposisi. Dengan Gerindra bergabung di pemerintahan maka akan memperlemah pengawasan di dalam pelaksanaan program kerja pemerintah. Apalagi kenyataannya sekarang yang oposisi total itu hanya PKS, Demokrat, dan PAN sedangkan PDIP, Gerindra dan Nasdem yang mana suaranya diatas 5% akan memperlemah *check and balance* sehingga dalam hal ini perlu dikritisi. Harapanku sederhana, yakni Jokowi beserta kabinetnya harus memenuhi janjinya secara konkret dengan kabinet yang ada terlepas dari



**I Putu Eka Cakra
(2017)**

Saya mengapresiasi Kabinet Indonesia Maju saat ini. Pertama, karena 55% dari kabinet ini berasal dari profesional yakni dari internal birokrasi, dokter, ahli kimia atau mungkin mantan Hakim MK yang menurutku itu merupakan satu langkah Jokowi untuk dapat keluar dari tekanan parpol atau pendukungnya sendiri. *Kedua*, dari partisipan anak muda yang dipilih oleh Jokowi untuk masuk pada kabinet Indonesia Maju kali ini. Seperti halnya Nadiem Makarim di mana kementerian yang dibawahinya sangat erat kaitannya dengan pengembangan kemanusiaan maupun kebudayaan, menurutku Nadiem terpilih karena kabinet ini ingin memiliki angka progresif dari pendidikan dan kebudayaan. Besar harapanku Mendikbud dapat memberikan banyak gebrakan-gebrakan. *Ketiga*, adanya pandangan politik balas budi di kabinet ini, mungkin bisa disebut neopolitik balas budi. Di mana penguatan yang awalnya hanya bersifat dari partai politik sekarang bisa dari perseorangan seperti Erick Tohir dan Wisnu Tama. Tetapi tidak dipungkiri kedua orang tersebut memiliki nilai jual dan produktivitas serta ditunggu gebrakkannya. Ada beberapa keresahan di mana dikabinet ini ada pembisnis di bidang SDA ekstraktif seperti Luhut Binsar yang menurut saya kedudukannya



**Ridho Al Faiz
(2017)**

Adhandi dan Dewi Novita Sari

SUSUNAN KABINET INDONESIA MAJU 2019-2024



Fakta Menarik dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Pada tanggal 23 Oktober 2019 yang lalu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Penempatan menteri di Kabinet Indonesia Maju bisa dibilang unik. Ada beberapa pos menteri yang ditempati sosok yang tak biasa. Sejumlah Fakta menarik pun muncul dalam kabinet Indonesia Maju yang telah terbentuk. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik dari Kabinet Indonesia Maju :

1. Menteri Termuda dan Tertua

Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan mantan bos Go-jek ini sebagai menteri termuda di kabinet baru ini. Tahun ini ia baru genap berusia 35 tahun. Walaupun begitu, Nadiem adalah sosok milenial yang memiliki banyak prestasi membanggakan selain sukses membawa nama besar Go-Jek, ia juga memiliki kontribusi besar pada perkembangan industri digital di tanah air dengan ikut membesarkan berbagai

1. Cara Mengumumkan Menteri

Pada 2014 lalu, Presiden Jokowi berada di tengah lapangan Istana Negara sambil membacakan nama menteri dan jabatannya. Para menteri yang disebut kemudian berlari dari pinggir lapangan menuju bagian tengah. Namun di tahun ini, Presiden Jokowi memilih untuk membacakan nama-nama menteri beserta jabatannya sambil duduk lesehan di tangga bagian depan istana. Para menteri juga ikut duduk lesehan di sisi kanan dan kiri presiden serta wakil presiden.

2. Targetkan Sektor Ekonomi dan Pembangunan SDM

Jokowi memberikan nama kabinet barunya dengan Kabinet Indonesia Maju bukan tanpa alasan. Menurut Jokowi disela-sela pengumuman nama menteri, pemberian nama ini tak lepas dari fokus kerja pada sektor ekonomi dan membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membawa Indonesia maju. Jokowi menginginkan dalam lima tahun ke depan kabinet ini fokus pada pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan membangun usaha kecil, mikro, dan menengah.

3. Pesan Jokowi untuk para menteri

Seusai memperkenalkan 34 nama menteri dan 4 pejabat setingkat menteri, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pesan. Salah satu pesan yang menarik adalah jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju diminta menghindari aktivitas kerja yang monoton. Selamat bekerja untuk para menteri!



DI TENGAH CUACA SEMARANG YANG SEMAKIN PANAS DAN EXTREME, BIKIN KAMU KEHAUSAN, KERINGETAN, DAN LEPEK.

TIBA-TIBA DI DEPAN KAMU ADA

- GREEN BOOSTER
- LECI YAKULT
- RED BANANA

JAWAB JUJUR APA PILIHAN PERTAMA YANG MUNCUL DI PIKIRAN KAMU? PENGEN MINUM JUICE NYA KAN? :), TENANG AJA KALIAN BISA MINUM BERAGAM VARIAN JUICE TERSEBUT DAN BANYAK YANG LAINNYA HANYA DI SMOOLY JUICE, JL. TUNJUNGSARI NO. 1A TEMBALANG, BURUAN SEBELUM KEHABISAN!!

